

**Judul** : Revisi UU Hak Cipta Rampung Dua Bulan, Polemik Royalti Kelar  
**Tanggal** : Minggu, 24 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Revisi UU Hak Cipta Rampung Dua Bulan, Polemik Royalti Kelar



**Mafirion**

ANGGOTA Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan segera digulirkan. Revisi ini menjadi kunci penguatan perlindungan hak cipta sekaligus memastikan penarikan royalti berlangsung transparan dan adil.

Dia bilang, beleid ini akan menuntaskan polemik royalti musik yang selama ini menuai kontroversi. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat konsultasi antara Kementerian Hukum (Kemenkum), DPR, musisi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Gedung DPR, Kamis (21/8/2025).

"Kami mengapresiasi komitmen semua pihak untuk mengakhiri polemik royalti yang berlarut-larut. Regulasi baru harus melindungi hak cipta, tanpa membelenggu kreativitas industri kreatif," ujar Mafirion, Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, musik harus memberi manfaat bagi kemajuan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Karena itu, perumusan revisi akan melibatkan pencipta, penyanyi, hingga

LMKN agar aspirasi semua pihak terakomodasi. "Kami optimistis revisi bisa selesai dalam dua bulan," tandasnya.

Mafirion juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat agar perlindungan hak cipta benar-benar terjamin, tanpa menghambat kreativitas musisi.

Senada, anggota Komisi X DPR sekaligus musisi Once Mekel menilai, revisi UU Hak Cipta akan menjadi fondasi baru bagi sistem pengumpulan dan distribusi royalti. "Regulasi baru harus efektif, transparan, dan berbasis teknologi digital agar pembayaran kepada pencipta lebih cepat dan akurat," tegasnya.

Once juga berharap UMKM tidak lagi merasa terbebani aturan royalti, sementara pencipta tetap memperoleh haknya. "Musik harus jadi sumber kegembiraan, bukan beban," ujar politikus PDIP itu. Ia juga menekankan perlunya penataan kelembagaan LMKN dan LMK agar lebih profesional.

Anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani menambahkan, pengelolaan royalti wajib berbasis teknologi informasi agar lebih akuntabel. "Dengan sistem digital, kecurigaan publik bisa ditepis, dan distribusi royalti benar-benar tepat sasaran," katanya.

Menurut Dhani, yang terpenting adalah memastikan royalti yang dibayarkan kafe, restoran, atau tempat hiburan benar-benar sampai kepada pencipta lagu. "Royalti musik harus tersalurkan kepada penerima manfaat, termasuk komposer maupun pencipta lagu," pungkasnya. ■ TIF